

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2021-2026

Provinsi Kalimantan Selatan

SEKRETARIAT DPRD



# KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri No 86 Tahun 2017.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 disusun berpedoman pada arah kebijakan dan target program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 -2026 yang selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk setiap tahunnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 memuat Tujuan, Sasaran Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. untuk memberikan kontribusi secara signifikan bagi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dalam pelaksanaan dan evaluasi secara berkala terhadap Muatan Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan perubahan perubahan yang terjadi. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 ini belum sepenuhnya sempurna sesuai dengan yang diharapkan. untuk itu, mohon saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan dikemudian hari dan Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluru h tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, Khususnya Bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarmasin, April 2023 Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Muhammad Jaini, SE., M.AP NIP 19710130 199303 1 004

# **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	2
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II	10
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTA	
2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	
2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATA	N 12
2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN	SELATAN 39
2.4 Tantangan Dan Peluang Layanan Pengembangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalin	
BAB III	55
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	55
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	55
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL K DAERAH TERPILIH	
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KAB/K	OTA 59
3.4 TELAAHAN RENCANANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LING HIDUP STRATEGIS	
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	60
BAB IV	64
TUJUAN DAN SASARAN	64
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	64
BAB V	66
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
BAB VI	67
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	67
BAB VIII	107
PENUTUP	107
8.1 KAIDAH PELAKSANAAN	107
8.2 KAIDAH PEMBIAYAAN	107



# BAB I PENDAHULUAN

# 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efesien dan bersasaran dalam rangka pencapaian tujuan Negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib atau Urusan Pemerintahan Pilihan Sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif.

Fungsi Rencana Strategis adalah Menjadi Pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD serta Instrumen evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan. Renstra memuat serangkaian rencana program, kegiatan dan tindakan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam unit satuan Perangkat Daerah.

Dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Terdapat 6 (enam) tahapan: Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan.

Dokumen Rencana Strategis ini dibuat sebagai pedoman bagi aparatur dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan aktifitas kegiatan serta untuk keseragaman pola berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan telah disusunnya RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026. Maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menindaklanjuti dengan menyusun

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang juga berpedoman pada RPJMD 2021-2026 tersebut dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi Pembangunan Daerah.

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang berorentasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program/Kegiatan serta Indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam rencana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya dan hasil pelaksanaannya Rencana Kerja tersebut akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

#### 1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, sejumlah peraturan perundang-undangan telah digunakan sebagai rujukan dalam sinkronisasi, integrasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Perwakilan Rakyat Provinsi/Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 9. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negra Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor).
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana
   Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005
   2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan
   Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18).
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan



- Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1).
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor).
- 19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Peraturan Daerah Kalimantan Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7
   Tahun 2016 Tentang Rencana
- 22. Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021
- 23. Peraturan Daereh Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- PERGUB Prov. Kalimantan Selatan No. 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
   Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019,
- 25. Peraturan Gubernur Nomor 0109 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
- 26. PERGUB Prov. Kalimantan Selatan No. 47 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja



Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

- 27. Surat Edaran Gubernur Nomor 440/281/PPPA/Tahun 2020 Tenteng Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- 28. Surat Edaran Gubernur Nomor Nomor 440/282 /DPPPA/Tahun 2020 Tentang
  Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
  Pada Pemerintah Kabupaten/Kota
- 29. Surat Edaran Gubernur Nomor Nomor 050 /0193.1/P2EPD/BAPPEDA/Tahun 2022
  Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat
  Daerah Tahun 2023
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 31. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 32. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 020 s/d 056 tanggal 10 April tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 33. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 057 Tahun 2023 tanggal 11 April tentang Perubahan Renstra 2021-2026.



## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini dimaksudkan untuk menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan dengan pendekatan secara *holistic-tematik*, *integrative* dan berbasis special yang berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan Visi, Misi Kepala Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan antara lain sebagai berikut :

- 1. Merumuskan Tujuan dan Sasaran pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- 2. Merumuskan Strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 3. Merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif selam 5 (lima) Tahun.
- 4. Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

# BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

# BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 tahun kedepan

# BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

**LAMPIRAN** 



# BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# 2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsinya merupakan administrasi dan pemberian dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD. Dan mengelola sumber daya dengan berdasar kepada perencanaan strategis dan Penetapan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta anggaran yang dimuat dalam APBD Provinsi Kalimantan Selatan

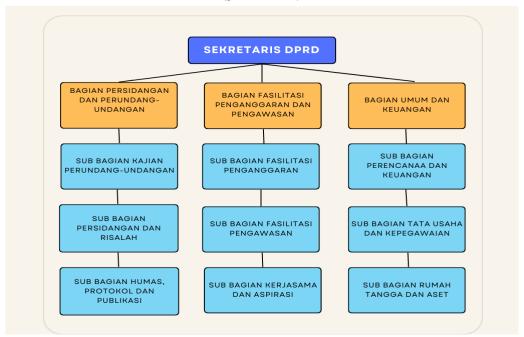
Sekretariat DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan tanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah Provinsi.

# A. Sekretariat DPRD mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan
- b. Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- c. Menyediakan dan mengoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- B. Kemudian untuk melaksanakan Tugas tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Fungsi sebagai berikut:
  - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;
  - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;
  - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan
  - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi

- C. Susunan Sekretariat Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :
  - 1) Sekretaris DPRD
  - a. Bagian Umum dan Keuangan;
  - b. Bagian Persidangan dan Perundangan Undangan;
  - c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
  - 2) Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset.
  - 3) Bagian Persidangan dan Perundangan Undangan, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Kajian Perundang Undangan;
  - b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
  - c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
  - 4) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
  - b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; dan
- c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi Berdasarkan Uraian diatas, Maka Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Berikut :

# STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Adapun Fungsi masing-masing struktur yang ada dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

## PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI

#### 1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas Memimpin Sekretaris dalam pelaksanaan tugas menetapkan program, mengatur dan memberikan petunjuk, mendistribusikan tugas, menyelenggarakan, mengkordinasikan, menetapkan data, mengevaluasi,menilai kinerja dan melaporkan kegiatan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mengendalikan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

# Rincian Tugas Jabatan:

- 1. Menetapkan Program kegiatan berdasarkan rencana kerja dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman.
- 2. Mengatur dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dengan



mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksaan tugas.

- 3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) pada lembar disposisi agar pekerjaan terbagi habis.
- 4. Menyelenggarakan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk kelancaran pelaksanaan tugas selanjutnya.
- Mengkoordinasikan kegitan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai petunjuk tehnik (juknis) untuk kelancaraan pelaksanaan tugas selanjutnya.
- Menetapkan Data Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai petunjuk tehnik (juknis) untuk Kelancaran pelaksanaan tugas selanjutnya.
- 7. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk tertib administrasi.
- 8. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan petunjuk tehnik (juknis) penilaian untuk bahan pengembangan karier pegawai.
- 9. Melaporkan Pelaksanaan tugas sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) sebagai pertanggung jawaban kerja.
- 10. Melaksanakan Tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk kelancaran pelaksanaan tugas lainnya.

# 1. KELOMPOK BAGIAN

- a. Bagian yang memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD (Bagian Umum dan Keuangan), melaksanakan fungsi:
  - 1) menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
  - 2) mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
  - 3) mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
  - 4) memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
  - 5) mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
  - 6) menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;

- 7) menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- 8) menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- 9) menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- 10) menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 11) mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 12) memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- 13) memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- 14) menyelenggarakanpenatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 15) melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- 16) mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 17) memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- 18) mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 19) mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- 20) mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
- 21) menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.
- b. Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi (Bagian Persidangan dan Perundang undangan); melaksanakan fungsi:
  - 1) menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
  - 2) memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
  - 3) memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
  - 4) memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - 5) mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
  - 6) memfasilitasi penyelengaraan persidangan;
  - 7) menyusun risalah rapat;
  - 8) mengoordinasikan pembahasan Raperda-
  - 9) memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
  - 10) memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
  - 11) menyelenggarakan hubungan masyarakat;
  - 12) menyelenggarakan publikasi; dan
  - 13) menyelenggarakan keprotokolan.



- c. Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan (Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan), melaksanakan fungsi:
  - 1) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan:
  - 2) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
  - 3) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD;
  - 4) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
  - 5) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertangungjawaban kepala daerah;
  - 6) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
  - 7) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
  - 8) memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - 9) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - 10) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - 11) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan; 12) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunanpokokpokok pikiran DPRD; dan
  - 13) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah.

# 2. KELOMPOK SUBBAGIAN

- 1) Kelompok Subbagian pada Bagian yang memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD (Bagian Umum dan Keuangan), terdiri dari:
  - a) Subbagian Program dan Keuangan, yang melaksanakan tugas:
    - 1) menyusun bahan perencanaan;
    - 2) menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
    - 3) menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;

- 4) merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- 5) merencanakan pemverifikasian keuangan;
- 6) memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- 7) mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/ GU/TU/LS;
- 8) memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- 9) memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- 10) merencanakan penatausahaan keuangan;
- 11) menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- 12) mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;
- 13) melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- 14) menganalisis laporan keuangan;
- 15) menganalisis laporan kinerja; dan 16) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
- b) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, yang melaksanakan tugas:
  - 1) melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
  - 2) melaksanakan kearsipan;
  - 3) menyusun administrasi kepegawaian;
  - 4) menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - 5) menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
  - 6) menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
  - 7) menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai.
- c) Subbagian Rumah Tangga, yang melaksanakan tugas:
  - 1) mengatur dan memelihara kebersihan kantor komplek Sekretariat DPRD;
  - 2) mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek Sekretariat DPRD;
  - 3) mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretariat DPRD;
  - 4) memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
  - 5) mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
  - 6) mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;

- 7) merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- 8) menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- 9) mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- 10) mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
- 11) melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.
- 2) Kelompok Subbagian pada Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi (Bagian Persidangan dan Perundang-undangan), terdiri dari:
- a) Subbagian Kajian Perundang-undangan, yang melaksanakan tugas:
  - 1) melaksanakan kajian perundang-undangan;
  - 2) membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
  - 3) menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
  - 4) membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;
  - 5) merancang bahan pembahasan Perda; dan
  - 6) menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM).
- b) Subbagian Persidangan dan Risalah, yang melaksanakan tugas:
  - 1) merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
  - 2) menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
  - 3) menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
  - 4) memfasilitasi rapat-rapat DPRD; dan
  - 5) menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD.
- c) Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi, yang melaksanakan tugas:
- 1) menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
  - 2) merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
  - 3) menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
  - 4) merencanakan kegiatan DPRD; dan
  - 5) merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD.
- 3) Kelompok Subbagian pada Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan (Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan), terdiri dari:

- a) Subbagian Fasilitasi Penganggaran, yang melaksanakan tugas:
  - 1) merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
  - 2) menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
  - 3) menyusun bahan pembahasan Raperda pertangung jawaban pelaksanaan APBD;
  - 4) menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
  - 5) menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertangung jawaban kepala daerah; dan 6) menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
- b) Subbagian Fasilitasi Pengawasan, yang melaksanakan tugas:
  - 1) mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - 2) merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
  - 3) menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - 4) menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran; dan
  - 5) menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan.
- c) Subbagian Kerjasama dan Aspirasi, yang melaksanakan tugas:
  - 1) memfasilitasi reses DPRD;
  - 2) merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
  - 3) menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
  - 4) menyusun pokok-pokok pikiran DPRD; dan
  - 5) melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD.



# 2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kapasitas yang dijalankan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD secara maksimal, Proses penyelenggaraan pelayanan di dukung oleh:

# 1. Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD

Sumber daya aparatur sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bisa diuraikan berdasarkan Jabatan Struktural dan fungsional, Pendidikan, Jenis Jabatan, Jenis Kepegawaian, Jenjang Diklat dan Data Terpilah.

Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

# DATA JUMLAH PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

						JU	MLA	H PE	RSON	IIL PI	NS					
SKPD	NAMA	20	16	20	17	20	18	20	19	20	20	20	21	20	)22	KET
		L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	
Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Jumlah		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	

# KABAG, KASUBAG DAN TENAGA PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	Danier.			Kası	ıbag					Tenag	a Pelaksa	ına				Tenaga Ja	pung		
NO	Bagian		2016		2	2017			2016			2017			2016			2017	
		L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J
1	BAGIAN PERSIDANGAN DAN HUKUM	3	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BAGIAN PROTOKOL	-	3	3	-	3	3	-	1	-	-	-	-	ı	-	-	-	-	-

	DAN LAYANAN ASPIRASI																		
3	BAGIAN KEUANGAN	1	2	2	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	BAGIAN TATA USAHA	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ju	ımlah																		
	_																		

	Pagion				K	asubaş	3						7	Гenaga	a Pelal	ksana	•						Tenag	ga Jap	ung	•		
N O	Bagian	2	2018		2	2019		2	020		2	018		2	019		2	020		2	018		2	019		2	020	
		L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J
1	TATA USAHA,PROTOK OL DAN KEHUMASAN	1	2	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	ı	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	-
2	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PERSIDANGAN HUKUM,AKD DAN LAYANAN ASPIRASI	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah																											



# KUALIFIKASI PEGAWAI NEGERI DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

	Kualifikasi							TAH	IUN						
No	Pegawai	20	16	20	17	20	18	20	19	20	20	20	21	20	22
		L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р
	Tk. Pendidikan														
	SD	3	0	3	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0
	SLTP	2	2	2	2	1	2	1	2	0	2	1	1	1	1
1	SMU	27	11	27	10	27	11	27	19	26	9	22	5	22	5
	Diploma	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	0	1	0	1
	Sarjana	8	10	10	7	10	5	12	7	12	7	14	6	14	6
	Pasca Sarjana	5	2	3	3	5	2	6	3	6	3	8	6	8	6
	Doktor / S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		45	26	45	23	45	21	48	32	45	22	45	19	45	19
	Masa Kerja														
	0 - 5 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 - 10 Tahun	24	3	24	3	24	3	24	3	24	3	25	4	25	4
2	10 - 15 Tahun	6	8	6	6	6	6	9	7	6	6	25	4	25	4
	15 - 20 Tahun	8	6	8	6	8	5	8	6	8	5	8	6	8	6
	20 – Keatas	7	9	7	8	7	7	7	7	7	6	-	-	-	-

Jumlah	ı	45	26	45	23	45	21	48	23	45	20	58	14	58	14
Usia									•						
	18 - 26 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26 - 33 Tahun	-	-	-	-	-	-	5	0	5	0	-	-	-	-
3	33 - 40 Tahun	8	10	7	8	7	8	7	8	7	8	-	-	-	-
3	40 - 47 Tahun	16	12	16	12	16	12	16	12	16	12	-	-	-	-
	47 Tahun Keatas	13	12	13	12	12	11	12	11	9	10	-	-	-	-
	Jumlah	37	34	36	32	35	31	40	31	37	30	-	-	-	-
	Jenis Kelamin								•						
4	Laki – Laki	45	-	45	-	45	-	48	-	45	-	45	-	45	-
	Perempuan	-	26	-	23	-	21	-	23	-	22	-	20	-	19
Jumlah	1	45	26	45	23	45	21	48	45	22	45	45	20	45	19

# DAFTAR TERPILAH GENDER PEGAWAI NEGERI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

# 1. MENURUT JENIS KEPEGAWAIAN

No	Jenis Diklat Struktural	20	021	2	022	Jumlah
NO	Jenis Dikiat Strukturai	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Juilliali
1	PNSD PROVINSI	45	18	45	19	127
2	PNSP DIPERBANTUKAN	-	-	-	-	0
	Jumlah		18	45	19	127

# 1. MENURUT JENIS JABATAN

No	Tingkat Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	ESELON	-	-	0
	I.A	-	-	0
	I.B	-	-	0
1	II.A	1	-	1
'	II.B	-	-	0
	III.A	2	1	3
	IV.A	4	1	5
	IV.B	-	-	0
2	FUNGSIONAL UMUM	38	17	55
	FUNGSIONAL TERTENTU	-	-	-
	a. Pranata Komputer	-	1	1
3	b.	-	-	-
	C.	-	-	-
	d. dst	-	-	-
_	Jumlah	45	20	65



# 2. MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Pendidikan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD			0
2	SLTP	1	1	2
3	SLTA	22	5	27
4	D-I			0
5	D-II			0
6	D-III		1	1
7	D-IV			0
8	S-1	14	6	20
9	S-2/Spesialis	8	6	14
10	S-3			0
	Jumlah	45	19	64

# 3. MENURUT JENJANG DIKLAT STRUKTURAL

No	Jenis Diklat Struktural	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	LEMHANAS	-	-	-
2	SPATI / DIKLAT PIM 1	-	-	-
3	SESPA / SPAMEN / DIKLAT PIM II	-	-	-
4	SPADYA / SPAMA / DIKLAT PIM III	3	-	3
5	SEPADA / ADUM / SEPALA / DIKLAT PIM IV	2	4	6
6	NON DIKLAT	-	-	-
	Jumlah	5	4	9



Dalam Undang-undang RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan dalam hal ini Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembentukan dengan prinsip Otonomi yang seluas-luasnya yang dimaksud dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin, melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Otonom. DPRD Provinsi terdiri dari atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD mempunyai fungsi:

- 1. Legislasi
- 2. Anggaran
- 3. Pengawasan

Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud untuk dijalankan dalam rangka revresentasi rakyat didaerah provinsi untuk menjaring aspirasi masyarakat. Dalam hal fungsi pembentukan perda provinsi dilaksanakan dengan cara:

- Membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda provinsi.
- Mengajukan usul rancangan perda provinsi
- Menyusun program pembentukan perda bersama gubernur yang dibuat dalamsatu tahun anggaran.

# 1) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2019 – 2024

DPRD Kalimantan Selatan mempunyai jumlah anggota DPRD sebanyak 55 Orang, terdiri dari:

No	DAPIL	JUML	AH	JUMLAH
		L	P	TOTAL
1	I Kota Banjarmasin	5	3	8
2	II Kab. Banjar	7	2	9
3	III Kab. Batola	3	1	4
4	IV Kab. Tapin Kab. HSS Kab. HST	7	2	9
5	V Kab. HSU Kab. Balangan Kab. Tabalong	8	1	9
6	VI Kab. Tanah Bumbu Kab. Kota Baru	8	0	8
7	VII Kab. Tanah Laut dan Banjarbaru	6	2	8

# a. Daerah Pemilihan:

- Daerah Pemilihan I yang meliputi Daerah Pemilihan Kota Banjarmasin sebanyak 8 orang
- Daerah Pemilihan II yang meliputi Daerah Pemilihan Kabupaten Banjar sebanyak 9 orang
- Daerah Pemilihan III yang meliputi Daerah Pemilihan Kabupaten Batola sebanyak 4 orang

- Daerah Pemilihan IV yang meliputi Daerah Pemilihan Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 9 orang
- Daerah Pemilihan V yang meliputi Daerah Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Utara,
   Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong sebanyak 9 orang
- Daerah Pemilihan VI yang meliputi Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru sebanyak 8 orang
- Daerah Pemilihan VII yang meliputi Daerah Pemilihan Kabupaten TanahLaut dan Kota Banjarbaru sebanyak 8 orang
- b. Jumlah Fraksi yang terdapat pada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 8 (delapan) Fraksi yang terdiri dari:
  - 1. Fraksi Golkar terdiri dari 12 orang
  - 2. Fraksi PDIP terdiri dari 8 orang
  - 3. Fraksi Gerindra terdiri dari 8 orang
  - 4. Fraksi PAN terdiri dari 6 orang
  - 5. Fraksi PKS terdiri dari 5 orang
  - 6. Fraksi Nasdem terdiri dari 4 orang
  - 7. Fraksi Peratuan Nurani Dekmokrat terdiri dari 7 orang
  - 8. Fraksi PKB terdiri dari 5 orang
- c. Alat Kelengkapan Dewan terdiri dari : Pimpinan, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badang Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta komisi dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan.
  - 1) Pimpinan DPRD
    - Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dari 3 (tiga) orang WakilKetua.
  - 2) Pansus terdiri dari anggota fraksi dengan jumlah tidak boleh lebih 15 orang atau sama dengan jumlah komisi yang terbanyak
  - 3) Jumlah Komisi ada 4 (empat) yang terdiri dari Komisi I, II, III dan IV yaitu:
    - 1. Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan

- 2. Komisi II yang membidangi Ekonomi dan Keuangan
- 3. Komisi III yang membidangi Pembangunan dan Infrastuktur
- 4. Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan Rakyat

# d. Bidang Tugas Komisi

## 1. Komisi I

Ruang Lingkup Bidang Pemerintahan, Ketertiban, Informasi dan Komunikasi, Hukum / HAM Meliputi: Pemerintahan, Pertanahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keamanan dan Ketertiban Umum, Kepegawaian, Kesatuan Bangsa dan Politik, Komunikasi dan Informasi, Hubungan Internasional, Organisasi Masyarakat, Pengembangan umber Daya Manusia, Penanggulangan Bencana, Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hubungan antar Provinsi/Kabupaten dan Kota, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

# Mitra Kerja:

- Satpol PP Damkar
- Dinas Kependudukan Catatan Sipil & KB,
- Badan Kepegawaian Daerah
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Dinas Penghubung
- Badan Kesatuan Bangsa & Politik
- Biro Pemerintahan
- Biro Hukum
- Biro Organisasi
- Biro Perlengkapan & Layanan Pengadaan Barang/Jasa
- Inspektorat Daerah



- Dinas Komunikasi & Informatika
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Sekretariat DPRD

#### 2. Komisi II

Ruang Lingkup meliputi Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, Ketahanan Pangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pariwisata, Keuangan dan Aset Daerah, Perbankan dan Lembaga Keuangan bukan Bank, Badan Usaha Milik Daerah, Perpajakan daerah dan Retribusi Daerah, Penanaman Modal dan Perizinan, Sarana dan Prasaran Perekonomian Daerah

# Mitra Keria:

- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah
- Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dinas Kelautan & Perikanan
- Dinas Pariwisata
- Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
- Dinas Perkebunan & Peternakan
- Dinas Perindustrian
- Dinas Perdagangan
- Dinas Kehutanan
- Badan Keuangan Daerah
- Biro Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah
- Biro Pengembangan Produksi Daerah
- Badan Usaha Milik Daerah
- Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah
- Sarana Prasarana Perekonomian Daerah



## 3. Komisi III

Ruang Lingkup Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, Meliputi: Pekerjaan Umum dan Tata Rung, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Lingkungan Hidup, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Penelitian dan Pengembangan Daerah Mitra Kerja:

- Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
- Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
- Dinas Perhubungan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Dinas Energi & Sumber Daya Mineral
- Badan Penelitian & Pengembangan Daerah

# 4. Komisi IV

Bidang Kesejahteraan Rakyat, Rung Lingkupnya meliputi: Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.

# Anak Mitra Kerja:

- Dinas Kesehatan
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Sosial
- Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
- Biro Kesejahteraan Rakyat
- Dinas Perpustakaan & Kearsipan
- Dinas Pemberdayaan



- Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Pemuda & Olah Raga
- Dinas Pariwisata

# 2) Tugas dan Wewenang DPRD

- a. Membentuk Perda Provinsi bersama Gubernur
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD
   Provinsi yang diajukan oleh Gubernur
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi danAPBD Provinsi
- d. Memilih Gubernur dan wakil gubernur atau wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa abatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi rencana perjanjian internasional diDaerah Provinsi
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yangdilakukan oleh Pemerintah Daerah
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lainatau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

# 3) Hak DPRD

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi serta hak dan kewajibannya dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna pelancaran tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan APBD.



# Sistem Pendukung DPRD:

Untuk mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang dibantu oleh kelompok Fakar dan Tim Ahli.

- a. Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD dipimpinan oleh seorangSekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Gubernuratas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.
- b. Kelompok Pakar atau Tim Ahli diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan.

# 4) Alat Kelengkapan DPRD:

a. Pimpinan

Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD bersifat kolektif dan kologial.

b. Badan Musyawarah

Badan musyawarah mempunyai tugas :

- Mentetapkan Agenda DPRD untuk 1 (satu) Tahun Sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa siding, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna untuk mengubahnya
- Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
- Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan Keterangan/Penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masingmasing
- Menetapkan jadwal acara Rapat DPRD
- Memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan
- Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus
- Melaksanakan tugas yang lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurnakepada Badan Musyawarah



## c. Komisi

# Komisi-Komisi mempunyai tugas:

- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuanPeraturan
   Perundang-Undangan
- Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD
- Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasimasyarakat
- Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- Melakukan Kunjungan Kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD
- Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
- Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruanglingkup bidang tugas masing-masing Komisi.

# d. Badan Legislasi Daerah

## Badan Legislasi Daerah bertugas:

- Menyusun rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dari prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setian Tahun Anggaran di lingkungan DPRD
- Koordinasi untuk penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah
- Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program yang telah ditetapkan
- Melakukan pengaharmonisasisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan
   Peraturan Daerah yang diajukan anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum



Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD

- Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota Komisi di luar Prioritas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau diluar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Program Legislasi Daerah
- Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi, memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Rancangan peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah
- Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan komisi pada masa keanggotaan berikutnya

#### e. Badan Anggaran

#### Badan Anggaran bertugas:

- Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada
   Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD
- Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangankebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara
- Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkanRancangan
   Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD
- Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri.
- Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Gubernur.



#### f. Badan Kehormatan

Badan Kerhormatan mempunyai tugas:

- Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan dan citra serta kredibilitas DPRD
- Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadapPeraturan Tata
   Tertib DPRD
- Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat
- g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk Rapat Paripurna
- Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lainberupa Panitia Khusus
- Panitia Khusus dibentuk atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah
- Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD
- Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapakn dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD
- Anggota Panitia Khusus terdiri atas Anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi
- Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh AnggotaPanitia Khusus
- Dalam hal diperlukannya DPRD dapat membentuk alat kelengkapanPanitia Khusus yang bersifat tidak tetap dengan keputusan DPRD.

#### 2. Sumber Daya Asset

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah tersedia sarana dan prasarana gedung kantor dan rumah dinas pimpinan DPRD terdiri atas:

- a. Tanah
- b. Alat-Alat Angkutan
- c. Alat Kantor dan Rumah Tangga
- d. Alat Studio dan Alat Komunikasi
- e. Bangunan Gedung
- f. Instalasi
- g. Jaringan
- h. Buku Perpustakaan

### Fasilitas Ruangan

No.	Fasilitas	Jumlah Yang Tersedia	Jumlah Yang Diperlukan	Keterangan
1	Ruang Rapat Paripurna	1	1	
2	Ruang Kerja Pimpinan DPRD	4	4	
3	Ruang Rapat Badan Musyawarah	1	1	
4	Ruang Rapat Badan Kehormatan	1	1	
5	Ruang Rapat Badan Perencana PeraturanDaerah (BP Perda)	1	1	
6	Ruang Fraksi	8	8	
7	Ruang Rapat Komisi	4	4	
8	Musholla	1	1	
9	Ruang Fotocopy	-	-	
10	Garasi	1	1	
11	Ruang Pompa air / Hidran	1	1	
12	Ruang Genset	1	1	
13	Ruang Press Room	1	1	
14	Ruang Kantin / makan	-	-	
15	Ruang Rapat / Aula	2	2	
	Jumlah	27	27	

## Sarana dan Prasarana Gedung

No.	Fasilitas	Jumlah Yang Tersedia	Jumlah Yang Diperlukan	Keterangan
1	Ruang Kerja Sekretaris DPRD	`1	1	
2	Ruang Kerja Kepala Bagian	3	3	
3	Ruang Kerja Kepala Subbagian dan Staf	6	6	
4	Perpustakaan	1	1	
5	Gudang	1	1	
6	Gudang Alat Tulis	1	1	
7	Gudang Inventaris	1	1	
8	Pos Jaga	4	4	
9	Tempat parkir mobil / motor	2	2	
10	Ruang Website	1	1	
11	Ruang Dapur	2	2	
12	Ruang kontrol sound system dan CCTV	1	1	
13	Ruang Panel Listrik	1	1	
14	Ruang Bendahara Rutin dan DPRD	1	1	
15	Ruang Bendahara Barang	1	1	
16	Ruang Merokok	1	1	
	Jumlah	29	29	

## Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2

No.	Fasilitas	Jumlah Yang Tersedia	Jumlah Yang Diperlukan	Keterangan
1	Bus Mercedes	2	2	
2	Toyota Hiace	4	4	
3	Toyota Prado	1	1	

4	Toyota Altis	7	7	
5	Toyota Kijang Innova	2	2	
6	Toyota Avanza	4	4	
7	Honda CRV	4	4	
8	Daihatsu Pick Up	1	1	
9	Nissan X Trail	-	-	
10	Honda Supra X 125	8	8	
11	Suzuki Thunder 125	1	1	
12	Suzuki Shogun FD 125 XSD	9	9	
13	Suzuki Shogun FD 110 XSDF	5	5	
14	Toyota Innova Venturer	1	1	
15	Toyota Camry	2	2	
16	Mitsubishi Pajero Sport	1	1	
17	R2 Yamaha W155 R	1	1	
	Jumlah	53	53	

Pengembangan peningkatan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus dilakukan untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pelayanan pada anggota DPRD dan masyarakat.

# 2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Fasilitator dari Tugas Pokok dan Fungsi DPRD, ukuran keberhasilan kinerjannya berdasarkan



tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan Fungsinya.

Pencapaian Kinerja pelayanan serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:



## Tabel Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Tabel T-C.23

No	Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target NSPK	Target Indikator Lainnya		Targe	et Renstra	Perangkat	t Daerah T	ahun ke-				Realisa	asi Capaiar	n Tahun ke					Rasio Cap	oaian pada	Tahun ke-		
	i ciangkat bacian			Laminya	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26
1.	IKM DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pelayanan Set. DPRD				76	78,3	79,5	80,88	82,3	83,6	92,00	78	80,9	93,4	93,4	98,9	93,67	84,25	103%	103%	117%	115%	120%	112%	109%
2.	Persentase Raperda Yang Diusulkan Tepat Waktu Ke Kemendagri				100	100	100	100	100	100	100	100	217	113	100	100	122,1	41,18	100%	217%	113%	100%	100%	122%	242,84%
3.	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir				100	100	100	100	100	100	100	100	125	100	93	100	240	133,33	100%	125%	100%	93%	100%	240%	75%
4.	Nilai Komponen IKM Layanan Persidangan				33	34,5	35	35,44	36,3	36,6	80	33	34,5	34,8	41,9	30	41	84,67	100%	100%	99%	118%	83%	112%	94%
5.	Persentase Jadwal Rapat Yang Tepat Waktu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	108,3	80,20	100%	100%	100%	100%	100%	108%	125%
6.	Nilai SAKIP Set. DPRD				СС	СС	BB	А	А	А	Α	СС	СС	ВВ	А	А	Α	82,98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Persentase serapan anggaran Set. DPRD				100	100	100	100	100	100	100	-	,	-	57,7	65	74,13	82,36	-	,	,	58%	65%	74%	121%
8.	Nilai Komponen IKM layanan keprotokolan				4,05	4,13	4,2	4,266	4,28	4,35	80	-	50	53,8	5,4	10	3,5	84,66	-	1212%	1280%	127%	234%	80%	94%
9.	Nilai Komponen IKM kehumasan				6,75	6,88	7	7,11	7,13	7,25	80	-	70	78,6	9	8	7	83,7	-	1018%	1122%	127%	112%	97%	96%
10.	Nilai Komponen IKM ketatausahaan				16,2	16,5	16,8	17,06	17,1	17,4	100	-	23,2	23,8	21,6	18,2	17,4	83,53	-	141%	142%	127%	106%	100%	120%
11.	Persentase asset yang tercatat				100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	97	96,66	101,23	-	100%	100%	100%	97%	97%	99%



# SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

12.	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian ASN Set. DPRD		100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	86,67	57,35	-	100%	100%	100%	100%	87%	174%
13.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Set. DPRD		100	100	100	100	100	100		,	100	100	100	100	100	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	
14.	Persentase ASN Set. DPRD yang memiliki sertifikat keahlian		100	100	100	100	100	100	80	ı	100	100	100	15,5	61,82	213,33	ı	100%	100%	100%	16%	62%	38%
15.	Jumlah Bahan Kajian Hukum terhadap Raperda		10	12	14	54	54	54	17	-	26	18	38	54	22	7	-	217%	129%	70%	100%	41%	243%
16.	Jumlah aspirasi yang diterima dan didistribusikan tepat waktu		40	40	40	40	40	40	96	1	-	-	40	57	96	128	1			100%	143%	240%	75%
17.	Jumlah pengaduan yang diterima dan difasilitasi		18	18	18	18	18	18	24	-	-	-	-	19	12	56	1	,	,		106%	67%	43%
18.	Jumlah reses yang bisa di akomodir dan di salurkan kepada yang berwenang		100	100	100	1320	1320	1320	401.280	-	100	100	1.320	1.670	3	392.060	1	100%	100%	100%	127%	1	102%
19.	Jumlah Ketersediaan Tenaga Ahli yang bersertifikasi dan aktif		18	18	18	18	18	18	450	18	18	18	18	18	18	270	100%	100%	100%	100%	100%	100%	167%
20.	Jumlah rapat dan sidang yang Sesuai Jadwal		300	320	330	340	350	360	1020	-	392	372	248	539	390	818	-	123%	113%	73%	154%	108%	125%

21.	Persentase anggota DPRD yang memiliki sertifikasi		90	90	90	95	96	100	100	-	70	82	117	96	101,8	66,36	-	78%	91%	123%	100%	102%	151%
22.	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada LKIP SOPD		26	26	27	27	28	28	28,85	-	26,4	27	27	28	28,8	28,80	-	102%	100%	100%	100%	103%	100%
23.	Persentase dokumen perencanaan anggaran dan kinerja yang tersedia		100	100	100	100	100	100	100	-	95	100	100	100	100	100	-	95%	100%	100%	100%	100%	100%
24.	Persentase dokumen laporan kinerja yang tersedia		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25.	Persentase dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan		100	100	100	100	100	100	100	100	95	100	97	100	100	87	100%	95%	100%	97%	100%	100%	115%
26.	Persentase laporan keuangan yang diselesaikan		100	100	100	100	100	100	100	95	100	90	97	100	100	78	95%	100%	90%	97%	100%	100%	128%
27.	Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran		100	100	100	100	100	100	96	-	-	-	-	-	96	96	-	-	1	ı	ı	96%	100%



28.	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayanai secara tertib		60	60	60	60	60	60	68	-	60	60	60	59	52	39	-	100%	100%	100%	98%	87%	174%
29.	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bersertifikasi		45	48	49	50	50	55	30	-	50	50	76	10	34	64	-	104%	102%	152%	20%	62%	47%
30.	Jumlah perserta pelatihan/bimtek yang paham		30	50	50	50	50	50		-	50	50	50	10	55	-	-	100%	100%	100%	20%	110%	
31.	Jumlah layanan keprotokolan		80	80	80	80	80	80	285	-	43	54	34	136	266	540	-	54%	68%	43%	170%	333%	53%
32.	Jumlah asset yang tercatat tertib		100	100	1139	1439	2027	2392	3000	-	60	1.013	1533	3028	2312	3037	-	60%	89%	107%	149%	97%	99%
33.	Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana		5	5	5	5	5	5	7	-	7	7	7	7	7	7	1	140%	140%	140%	140%	140%	
34.	Jumlah kegiatan DPRD yang di publikasi		100	100	100	100	300	325	2000	-	100	100	300	296	822	4256	103%	103%	117%	115%	120%	253%	47%



## Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tabel T-C.24

Uraian			Anggaran p	oada Tahun K	Ke-				Realisasi Ang	ggaran pada Tahun	Ke-		Rasio a	antara Rea	alisasi dar	n Anggara	n Tahun l	Ke- (%)	Rata - Pertumbu	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
-1	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	50	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	10.142.25 9.000	12.597.26 8.440	12.523.16 8.500	12.004.514.2 50	-	-	8.683,246,991	10.667.570.374	10.893.285.952	11.085.330.461	-	-	85.61	84.68	86.99	92.34	-	-20,1	-18,3
Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	207.400.0	204.000.0	497.400.0 00	183.800.000	-	-	156.250.000	180.350.000	370.980.800	183.797.000	-	-	75.34	88.41	74.58	99.99	-1	-5,2	-7,3
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	150.581.0 00	215.546.5 00	1.092.509	1.445.256.25	295.29 5.700	-	143.040.000	212.115.000	930.871.722	1.353.203.432	293.545.322	-	94.99	98.41	85.20	93.63	99	80,8	35,4
Penyediaan alat tulis kantor	-	117.558.0 00	126.436.5 00	1.092.509 .000	0	-	-	116.209.000	123.977.500			-	-	98,85	98,06			-	176,0	139,4
Rapat Koordinasi Dalam Daerah	-	746.762.0 00	690.440.0 00	-	-	-	-	715.500.877	674.770.054	-	-	-	-	95.81	97.73	-	-	-	-26,9	-26,4
Penyediaan Makanan dan Minuman	-	2.577.028 .000	2.260.772 .000	2.786.684 .000	2.704.348.00 0	=	=	2.373.345.000	2.385.162.500	2.680.261.590	2.661.797.900	-	=	92.10	91.01	96.18	98.42	=	-23,0	-22,0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	1.500.000	1.371.765 .440	1.405.765 .440	1.571.008.00	1.185. 443.17 0	-	752.380.157	813.858.174	857.565.485	946.382.474	946.431.358	-	50.16	59.33	61.00	60.24	80	-29,7	-19,0
Penyediaan Jasa Tenaga Ahli / Kelompok Pakar / Nara Sumber	-	645.000.0 00	-	-	-	-	-	507.300.000	-	-	-	-	-	78.65	-	-	-	-	-25,0	-25,0
Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	-	1.207.830 .000	1.518.800 .000	2.903.364	3.116.752.00	-	-	1.194.050	1.497.972.000			-	-	98.86	98.63			-	53,9	31,3
Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	1.105.162 .000	1.172.718 .000	.000	0	=	=	1.036.050.000	997.406.000	1.902.864.000	3.116.247.000	-	=	93.75	85.05	99.98	99.98	÷	-46,6	12,7
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	451.680.0 00	644.980.0 00	960.600.0 00	1.029.600.00	1.282. 506.50 0	-	319.290.000	628.799.730	705.871.549	959.307.727	768.434.000	-	70.69	97.49	73.48	93.17	60	37,0	31,3
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	1.015.000	1.114.500	-	1.402.841.00	-	-	1.000.073.601	800.263.672	-	1.291.401.928	-	-	98.53	71.80	-	99.18	-	-16,1	-55,0



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	110.030.0 00	130.750.0 00	518.850.0 00	175.000.000	149.17 4.700	-	108.067.000	101.575.000	518.653.000	174.703.000	138.138.000	-	98.22	77.69	99.96	99.83	93	136,6	79,3
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	370.140.0 00	344.940.0 00	375.900.000	299.30 0.000	-	-	251.745.000	268.560.000	298.490.000	299.032.000	-	-	68.01	77.86	79.40	100	-26,2	4,5
Penyediaan Jasa Pendukung Peningkatan Jasa Publikasi dan Pemberitaan	1	1	1.992.912 .000	,	•	•		-	1.668.378.189	,	,	,	1	1	83.72	1	1	1	-50,0	-25,0
Penyediaan jasa surat menyurat	=	308.228.0 00	423.508.0 00	-	-	741.22 8.000		261.729.356	331.194.600	-	-	676.823.175	-	84.91	78.20	=	-	91	-40,6	-18,4
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	6.385.478 .000	12.729.26 3.285	19.305.94 0.000	20.157.596.0 00		,	5.871.114.156	11.174.188.169	15.645.613.214	13.618.549.604	-	-	91.94	87.78	81.04	67.56	,	51,8	4,3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	274.885.0 00	356.050.0 00	1.159.150	-	-	-	273.270.000	335.975.000	1.153.980.000	-	-	-	99.41	94.36	99.55	,	-	95,2	41,6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	318.545.0 00	1.334.836 .560	.000	-	-	-	301.128.030	802.952.345		-	-	-	97.04	60.15	,,,,,	-	=	29,8	16,7
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	•	-	•	8.809.000.00 0	-	-	-	-	•	3.384.489.000	-	-	-	=	-	38.42	-		-25,0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	-	20.000.00	20.000.00	-	-	-	-	19.655.000	18.675.000	-	-	-	-	98.28	93.38	-	-	-	-50,0	-26,2
Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Pimpinan DPRD	-	-	-	-	-	ŕ	-	-	-	-	-	-	-	,	i e	í	-	,	0,0	0,0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	ı	670.176.0 00	1.334.836 .560	3.008.270 .000	3.407.908.00	-	-	658.992.229	802.952.345	2.931.331.976	2.822.051.804	-	-	98.33	60.15	97.44	82.80	1	90,8	45,8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	1.156.962 .000	1.268.808 .000	1.126.758 .000	1.334.720.00	-	-	899.303.200	879.977.800	978.219.480	1.256.239.900	-	-	77.73	69.35	86.82	94.12	-	1,4	-15,6



Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	3.130.600 .000	7.962.878 .350	-	5.159.368.00 0	-	-	2.998.480.000	7.531.684.720	-	4.784.518.900	-	-	95.78	94.58	-	92.73	-	4,8	-12,2
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	-	198.500.0 00	168.500.0 00	-	-	-	-	169.694.697	153.267.804	-	-	-	-	85.49	90.96	-	-	-	-28,8	-27,4
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	459.500.0 00	726.490.3 75	-	-	-	-	329.260.000	617.600.000	-	-	-	1	85.37	85.01	-	=	=	-10,5	-3,1
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	802.750.0 00	1.417.000 .000	-	-	-		649.275.000	1.217.943.301	-	-	-	-	80.88	85.95		,		-5,9	-3,1
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	802.750.0 00	1.417.000	-	-	-	-	649.275.000	1.217.943.301	-	-	-	-	80.88	85.95	=	-	=	-5,9	-3,1
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan & Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	1.006.498 .000	1.351.604 .000	-	-	-	•	829.124.744	945.485.531	-	-	-	-	82.38	69.95	,	,	,	-16,4	-21,5
Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat DPRD	-	558.498.0 00	561.704.0 00	-	-	-	-	474.670.000	496.800.000	-	-	-	-	84.99	88.45	-	-	-	-24,9	-23,8
Olahraga Dewan dan Staf	-	26.400.00 0	25.400.00 0	-	-	-	=	13.464.000	15.600.000	-	-	-	-	51.00	61.42	E	-		-25,9	-21,0
Pendidikan dan pelatihan formal	-	421.600.0 00	764.500.0 00	-	-	-	-	340.990.744	433.085.531	-	-	-	-	80.88	56.65	-	-	-	-4,7	-18,2
Peningkatan Kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur	-	-	-	-	212.000.000	-	-	-	-	-	165.155.078	-	1	-	-	-	77.90	-	-	-25,0
Pengadaan pakaian kerja dan hari-hari tertentu	-	-	-	-	1.319.875.00 0	-	-	-	-	-	960.995.000	-	-	-	-	-	72.80	-	-	-25,0

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	114.020.0 00	67.000.00 0	3.701.616 .000	-	-	-	76.775.000	45.430.250	3.305.543.320	0	-	-	67.33	67.81	89.30	-	-	2677,1	1758,8
Penyusunan Rencana Kerja	-	50.250.00	13.000.00	-	-	-	-	34.650.000	3.877.000	0	0	-	-	68.96	29.82		-	-	-43,5	-47,2
Pengelolaan Arsip kantor	-	-	-	561.704.0 00	767.572.000	-	-	0	0	508.573.844	701.593.200	-	-	-	-	90.54	91.40	-	9,2	-15,5
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	63.770.00 0	54.000.00	456.600.0 00	601.650.000	-	-	42.125.000	41.553.250	376.411.703	538.237.273	-	-	66.06	76.95	82.44	89.46	-	376,9	186,9
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA		1.941.704	-	-	-	-	-	1.504.429.200	-	-	-	-	-	77.48	-	-	-	-	-25,0	-25,0
Website DPRD Prov. Kalsel	-	131.864.0 00	-	-	-	-	-	128.160.000	-	-	-	-	-	97.19	-	-	-	-	-25,0	-25,0
Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan, Penerbitan, dan Pengiriman Buletin Legislatif Rumah Banjar	-	-	-	-	-	-	ı	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	75.224.12 9.000	94.821.44 2.000	106.859.0 12.000	116.283.796. 000	-	-	44.139.158.535	56.963.143.849	66.008.566.654	67.499.239.298	-	-	58.68	60.07	61.77	58.04	-	15,1	-13,2



Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Peningkatan Pendidikan/Bimbinga n Teknis dan Sosialisasi Pimpinan dan Anggota DPRD	-	·	·	-	-		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	-	4.341.820 .000	4.339.820 .000	-	56.576.160.0 00	-	-	1.502.324.423	1.785.890.241	-	35.809.413.348	-	-	34.60	41.15	-	63.29	-	-25,0	-45,3
Pembahasan rancangan peraturan daerah	-	22.310.60	-	29.543.75 0.000	30.356.900.0	-	-	10.680.041.232	-	12.267.058.899	8.943.873.619	-	-	47.87	-	41.52	29.46	-	-24,3	-56,8
Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Anggota DPRD	-	268.897.0 00	138.325.0 00	162.900.0 00	190.950.000	-	-	28.430.350	21.317.810	43.768.815	139.432.360	-	-	10.57	15.41	26.87	73.02	-	1,0	49,7
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah	-	28.149.20 0.000	41.564.80 0.000	58.812.80 0.000	-	•	•	20.509.520.494	27.560.614.577	40.327.026.201	-	-	-	72.86	66.31	68.57	-	•	7,7	-4,8
Pembahasan Raperda Insiatif	-	9.306.200 .000	14.900.00 0.000	-	-	1	-	3.820.359.706	8.156.128.770	-	-	-	-	41.05	54.74	1	-	1	-35,0	3,4
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	-	128.500.0 00	262.500.0 00	492.000.0 00	554.800.000	-	-	111.540.000	204.365.800	490.856.500	553.448.220	-	-	86.73	77.85	99.77	99.75	-	73,0	34,0
Penyusunan, Penerbitan, dan Pengiriman Buletin Legislatif Rumah Banjar	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0



Kegiatan Reses	-	5.297.750 .000	6.347.250 .000	8.801.500 .000	16.644.500.0 00	31.099 .973.7 00	-	3.649.463.600	5.398.962.000	7.905.130.100	14.978.681.400	27.856.765.745	ı	68.89	85.06	89.82	89.99	90	46,6	67,5
Rapat-rapat paripurna	-	93.862.00 0	72.862.00 0	-	2.091.162.00 0	-	-	53.187.500	30.895.000	-	1.045.349.750	-	-	56.67	42.40	-	49.98	-	-55,6	-60,5
Pelayanan Ke Protokolan	=	56.700.00 0	186.110.0 00	1.306.950 .000	2.364.924.00	-	1	18.100.000	113.979.281	859.845.120	2.188.332.187	-	T.	31.92	61.24	65.79	91.53	-	378,4	309,7
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	124.000.0 00	124.000.0 00	-	0	-	-	79.000.000	-	43.107.500	-	-	-	63.71	34.76	-	-	-	-50,0	-50,0

#### Pada Tabel T.C 24

Dijabarkan bahwa pada program dan kegiatan tahun 2016-2020 terjadi peningkatan maupun penurunan pada realisasi anggaran penurunan realisasi anggaran dapat dilihat pada Program Administrasi Perkantoran yang mana target pada tahun 2020 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah Rp 12.004.514.250 tetapi realisasi anggaran hanya Rp. 11.085.330.461 hal ini disebabkan oleh pandemic Covid-19 karena mempengaruhi kegiatan yang ada.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan unsur Pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai Tugas Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD serta menyediakan tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan Hak dan Fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tidak membahas hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Hasil telaahan terhadap RT/RW dan hasil terhadap KLHS dikarenakan dikarenakan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tidak berkaitan langsung dengan hal tersebut.

Namun demikian kedepan terdapat tantangan yang terkait dengan pengembangan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan antara lain

- 1. Perlunya Meningkatkan Profesionalisme Anggota DPRD, Fraksi-fraksi DPRD dibantu oleh tenaga ahli/Tim Ahli Fraksi yang bersifat regular (tetap) sedangkan kelompok pakar atau tim ahli yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan wewenang atau kelengkapan DPRD Provinsi (Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi lainnya, Pansus Eksekutif dan Pansus Lainnya serta Pansus Inisiatif yang dibentuk bersifat tidak tetap
- Perlunya Meningkatkan kinerja fasilitasi pelayanan kepada masyarakat dengan tersedianya fasilitasi Publikasi dan Pemberitaan, Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta dengan terbitnya Buletin Legislatif Rumah Banjar.
- 3. Perlunya Meningkatnya kemampuan pendidikan formal SDM Anggota Dewan dan AparaturSekretariat DPRD melalui mengikuti Diklat dan Bintek, Sosialisasi dan Orientasi.
- 4. Perlunya Meningkatnya kemampuan SDM Anggota Dewan dan Staf Sekretariat DPRD juga dengan Study Komperatif untuk memfasilitasi sosialisasi kerja dengan kebijakan mengintensifkan koordinasi, konsultasi, study koperatif baik ke Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lain, atau ke Departemen/Lembaga yang berkaitan dengan kajian dan Pembahasan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah), kunjungan kerja ke kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Selatan serta akan melaksanakan study komperasi ke Luar Negeri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan lainnya juga melaksanakan kegiatan Reses ke daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.



- 5. Perlunya Meningkatnya Peran Legislasi yang dibutuhkan masyarakat dengan target kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Legislasi Daerah (DPRD) melalui Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pansus Lainnya serta Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan.
- 6. Perlunya Motivasi Kerja dalam rangka Pengembangan SDM yang bervariatif

# 2.4 Tantangan Dan Peluang Layanan Pengembangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Pilihan Langkah Strategis

1. Kondisi Internal yang terdiri atas Kekuatan dan Kelemahan:

#### • KEKUATAN (Strength)

- 1. Eksistensi Lembaga Sekretariat dewan sebagai bagian integral dan menajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2. Dukungan anggaran dan peralatan kerja yang cukup memadai.
- 3. Kemandirian dan optimalisasi pelayanan terhadap lembaga DPRD dan Publik berdasarkan peraturan perundang- undangan.

#### • KELEMAHAN (Weakness)

- 1. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, professional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan terjadi.
- 2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
- 3. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- 4. Layanan Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya, hal ini tentunya akan memacu Sekretariat DPRD dalam melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan.
- 2. Kondisi Eksternal yang terdiri atas Peluang dan Tantangan :



#### • PELUANG (Opportunities)

- 1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD.
- 2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
- 3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Lembaga perwakilan rakyat daerah.
- 4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan aksebilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta informasi public.
- 5. Dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

#### • TANTANGAN/ANCAMAN (Threats)

- 1. Perubahan instrument penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sering berubah-rubahnya Peraturan- peraturan dari Pemerintah Pusat.
- 2. Makin Tingginya Tuntutan peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD.
- 3. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- 4. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.
- 5. Dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Faktor-faktor Kunci keberhasilan (critical success factors) merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan Strategis organisasi melalui pendekatan analisis SWOT/TOWS.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT/TOWS terhadap faktor-faktor Strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut, maka



dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagi Institusi yang kapabel dibidangnya
- Optimalkan Ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.



## BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

# 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengemban Tugas dan Fungsinya Senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan Internal Organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis yaitu Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness), serta Berupa lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri tas dua factor yaitu Peluang (Opportunity) dan Ancaman / Tantangan (Threat), Pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan SWOT.

Mengenai Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Ancaman / Tantangan (Threath) dalam menjalankan pelayanan dan dukungan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bisa digambarkan melalui pelayanan penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Sangat dipengaruhi oleh Faktor-faktor Lingkungan dan Isu-isu Strategis yang terkait proses demokratisasi dan disentralisasi serta pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika komplek dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada umumnya.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya	Minimalnya Kualitas	1.Tidak Memliki
	pelayanan terhadap	Layanan Kegiatan	Ketersediaan
	pelaksanaan Tugas dan	Persidangan, dan Aspirasi	Fasilitasi dan
	Fungsi DPRD		Bahan Kajian
			Hukum terhadap
			Raperda Fasilitasi
			kegiatan Reses

		2.Tidak ada
		penyediaan risalah
		rapat dan tenaga
		ahli serta
		Terlaksananya
		fasilitasi
		peningkarab
		kapasitas SDM
		anggota DPRD
2.	Kurangnya akuntabilitas	1.Tidak Menyusun
	kinerja Set. DPRD serta	Perencaan,
	Kurangnya kualitas	Pengangguran dan
	perencanaan dan pelaporan	Pelaporan Kinerja
	kinerja.	SOPD
		2.Tidak
		terlaksanya
		administrasi dan
		pelaporan
		keuangan SOPD
3.	Kurangnya Pelayanan	1.Tidak Menyusun
	Keprotokolan dan	Data Kepegawaian,
	Kehumasan dan	Evaluasi,
	ketatausahaan serta	Administrasi
	kurangnya Pemenuhan	Kepegawaian
	sarpas.	SOPD serta
		Administrasi
		Perkantoran
		Memfasilitasi
		kegiatan
		Keprotokolan

	2.Tidak
	Merencanakan dan
	Mengadakan
	Sarana dan
	Prasarana serta
	Administrasi
	Perkantoran
	Publikasi informasi
	kegiatan DPRD

# 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Yakni: Misi 4 Sasaran 3 makna dari uraian visi tersebut adalah Meningkatnya Pelayanan Publik.

Visi yang ditetapkan merupakan keinginan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang menempatkan pusat isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintah dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efesien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan dalam misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 sebagai berikut:

#### 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 merupakan salah satu Perangkat Daerah pelaksanaan misi 4 dengan tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik yang akan dilaksanakan melalui program-program pada sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:



- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Adapun Indikator Kinerja Utama terkait visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah Nilai Repormasi Birokrasi, yang diukur melalui meningkatnya indeks kepuasan terhadap pelayanan sesuai standart operasional prosedur.

Dari Uraian Visi dan Misi diatas, maka faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dirumuskan pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi

Kalimantan Selatan terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kepala

Daerah / Wakil Kepala Daerah

Visi : KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera Dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA

a. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik

			Fal	ktor
No	Misi Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintaha n yang Profesional dan	1. Belum optimalnya pelayanan terhadap fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	Kurangnya     Pendidikan SDM	- Tersedianya SDM yang banyak dan terfasilitasinya pengembangan SDM
	Berorientasi pada Pelayanan Publik			- Komitmen pimpinan untuk menambah jumlah SDM serta memenuhi kualifikasi baik melalui pendidikan maupun Pelatihan
			2. Tumpang	- Terfasilitasinya sarana dan prasarana

	tindihnya kepentingan fraksi		kebutuhan DPRD
2.Belum Optimalnya Kapasitas Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	<ol> <li>Terbatasnya Kemampuan SDM aparatu</li> <li>Rendahnya Motivasi Aparatur Sekretariat I Provinsi Kalimantan Selatan</li> <li>Rendahnya tingkat Disip</li> <li>Rendahnya pemahaman terhadap Tuj</li> </ol>	teknis ir A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Penerapan dan bengembangan SOP sebagai bendukung belaksanaan tugas dan fungsi Memberikan Apresiasi atas dedikasi aparatur dan memberikan eguran atas kesalahan yang dilakukan. Komitmen bimpinan untuk memenuhi kualifikasi Aparatur baik melalui pendidikan maupun Pelatihan.

# 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KAB/KOTA

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit penunjang dan pelayanan administratif maka sasaran program yang tertuang dalam Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi dapat terlaksana dengan baik dan saling melengkapi satu sama yang lain. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Kota / Kabupaten tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masingmasing OPD.



Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi dalam bidang perencanaan pembangunan, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Sekretariat DPRD bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah dari rencana strategis kementerian/Lembaga dan kota / kabupaten tidak secara langsung berkaitan. Masing-masing lembaga perencana baik ditingkat pusat maupun kota / kabupaten melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

# 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan pelayanan dan administrasi tugas-tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga, meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan tata kelola Pemerintahan Daerah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada peningkatan kualitas, kompetensi dan kinerja aparatur pemerintah daerah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, penyediaan produk hukum daerah yang mengakomodir kebutuhan daerah.

Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu melakukan langkahlangkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

#### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan kinerja, karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.



Dari uraian –uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa yang menjadi perhatian atau fokus utama dalam penentuan isu-isu strategis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

- 1) Isu Strategi Sekwan dengan Meningkatkan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD:
  - a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
  - b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
  - c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
  - d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
  - f. memfasilitasi penyelengaraan persidangan;
  - g. menyusun risalah rapat;
  - h. mengoordinasikan pembahasan Raperda;
  - i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris masalah (DIM);
  - j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
  - k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
  - l. menyelenggarakan publikasi; dan
  - m. menyelenggarakan keprotokolan.
- 2) Isu Strategi Bidang Umum dan Keuangan dengan Meningkatkannya akuntabilitas kinerja Set. DPRD Peningkatan Administrasi Umum dan Keuangan:
  - a. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
  - b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
  - c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
  - d. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;

- e. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
- j. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 1. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- n. Menyelenggarakanpenatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
- Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.Isu Strategi Bidang
   Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan:
- 3) Isu Straetgi Bidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dengan Peningkatan Administrasi Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan:
  - a. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA
     PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
  - b. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;



- c. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertangungjawaban kepala daerah;
- f. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- m. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

# 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi kepala daerah dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Isu-isu dan Analisis Strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Dengan berlandaskan Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala daerah dan Wakil kepala daerah, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 merumuskan tujuan sebagai berikut:

# "MENINGKATKAN PELAYANAN YANG PROFESIONAL KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG OPTIMAL"

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masingmasing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategi.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin



dicapai adalah Meningkatnya Pelayanan Prima terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

TC. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

			INDIKATOR	TARG	ET KINER	JA UTAM	A PADA T	AHUN
NO	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN/SASARAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MENINGKATKAN PELAYANAN YANG PROFESIONAL	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	100	100	100	100	100
1	DAN OPTIMAL KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN"	MENINGKATNYA PELAYANAN PRIMA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	IKM DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	82,5	84,15	85,83	87,54	89,30



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, Strategis dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategis dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategis dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD.

Strategis dan kebijakan jangka menengah menunjukan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun Strategis dan kebijakan yang akan ditempuh dapat dilihat pada table 5.1. berikut ini:

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

TC. 26

Visi : KALSEL MAJU (Kaliman	tan Selatan Makmur, Sejahtera Dan Berkelanjutan) SEBAGAI
GERBANG IBUKOTA NEGAR	A

Misi · Tata Kel	ola Pemerintahan var	o Lehih Fokus Pada	a Pelayanan Publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan yang Profesional dan Optimal Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Meningkatkan Pelayanan yang Profesional dan Optimal Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	1.Meningkatkan Pelayanan Administrasi terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2.Meningkatkan Tata laksana layanan Tugas-tugas Legislasi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	1.Meningkatkan Profesionalisme Aparatur  2.Menyusun pedoman / juknis tata laksana layanan Tugas-tugas legislasi Alat Kelengkapan Dewan



## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna untuk sasaran tertentu.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap TRI fungsi DPRD (Fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan), yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terdapat beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.

Dalam prioritas program yang akan dilaksanakan lebih bernuansa pada pemadatan program agar mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang berdampak atau memberi manfaat kepada pelayanan dan pemberian dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Memperhatikan permasalahan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pelayanan atas tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, khususnya agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan maka perlu ditentukan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi,
   Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini, antara lain:
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- 10) Layanan Administrasi DPRD

#### 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini, antara lain:

- 1) Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
- 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran
- 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- 4) Peningkatan Kapasitas DPRD
- 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- 6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- 7) Pembahasan Kerja Sama Daerah
- 8) Fasilitasi Tugas DPRD



Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

			Program,	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,		Data Capaian					1	m dan Kerangk	1				pada periode		Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Kode	Kegiatan, Sub	Program (outcome),	Satuan	pada Tahun Awal	20	22	20	)23	20	2024 2025		20	)26			Perangka t Daerah	Lokasi	
			Kegiatan	Kegiatan (output), dan Sub kegiatan		Perencanaan ( 2021)	Target	Rp.	Target	Rp.	Penanggu ng jawab									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya Pelayanan Yang Profesional dan Optimal Kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan																				
	Meningkatnya Pelayanan Prima terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD																			
		4.02	SEKRETARIAT DPRD				100	197.002.1 27.241	100	254.864.3 44.270	100	318.102. 912.027	100	367.924.45 5.733	100	427.018.92 6.536				
		4.02.01	PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretaria tan	Poin	100	100	83.962.80 0.941	100	147.904.5 49.070	100	172.970. 319.327	100	193.775.34 4.493	100	218.049.99 3.048				



		4.02.01.1 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaa n, Penganggar an dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100%	635.014.8 00	100%	1.166.898 .300	100%	2.076.28 9.400	100%	2.491.547.2 80	100%	2.957.456. 736		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		4.02.01.1 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaa n anggaran dan kinerja yang tersedia	%	100%	17.217.20 0	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Dokum en	30 Dokumen	17.217.20 0	30 Dokumen	18.562.60 0	30 Dokumen	180.000. 000	30 Dokumen	216.000.00 0	30 Dokumen	226.800.00 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		4.02.01.1 .01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase dokumen perencanaa n anggaran dan kinerja yang tersedia	%	100%	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokum en	1 Dokumen	3.900.000	1 Dokumen	39.472.00 0	1 Dokumen	180.000. 000	1 Dokumen	216.000.00	1 Dokumen	259.200.00 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		4.02.01.1 .01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase dokumen perencanaa n anggaran dan kinerja yang tersedia	%	100%	3.432.000	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan

												1		,	,	 	T
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokum en	1 Dokumen	3.432.000	1 Dokumen	39.043.00 0	1 Dokumen	180.000. 000	1 Dokumen	216.000.00	1 Dokumen	259.200.00 0			Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase dokumen perencanaa n anggaran dan kinerja yang tersedia	%	100%	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-			Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokum en	3 Dokumen	3.900.000	3 Dokumen	39.511.00 0	3 Dokumen	180.000. 000	3 Dokumen	216.000.00	3 Dokumen	259.200.00 0			Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase dokumen perencanaa n anggaran dan kinerja yang tersedia	%	100%	3.588.000	-										Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokum en	1 Dokumen	3.588.000	1 Dokumen	37.873.00 0	1 Dokumen	180.000. 000	1 Dokumen	216.000.00	1 Dokumen	259.200.00 0			Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen laporan kinerja yang tersedia	%	100%	6.664.800	-	-	-	-	-	-	-	-			Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja GKPD	Lapora n	18 Laporan	6.664.800	18 Laporan	86.720.40 0	18 Laporan	180.000. 000	18 Laporan	216.000.00	18 Laporan	259.200.00 0			Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komponen Perencanaa n Kinerja pada LKIP SOPD	Poin	10 Poin	596.312.8 00	-	-	-	-	-	-	-	-			Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapora n	1 Laporan	596.312.8 00	1 Laporan	905.716.3 00	1 Laporan	996.289. 400	1 Laporan	1.195.547.2 80	1 Laporan	1.434.656. 736			Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100%	10.899.43 7.226	100%	11.912.22 3.200	100%	14.965.4 16.690	100%	17.895.246. 618	100%	21.407.879 .861			Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase dokumen administrasi keuangan	%	100%	10.516.03 8.026	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12 Bulan	10.516.03 8.026	12 Bulan	11.000.00 0.000	12 Bulan	13.471.1 37.490	12 Bulan	16.165.364. 988	12 Bulan	19.398.437 .986			Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



	4.02.01.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaia n dilayani Secara Tertip	%	100%	313.689.4 00	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokum en	12 Dokumen	313.689.4 00	12 Dokumen	358.689.4 00	12 Dokumen	421.689. 400	12 Dokumen	442.773.87 0	12 Dokumen	464.912.56 4		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Persentase laporan keuangan yang diselesaikan	%	12 Dokumen	66.709.80 0	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Dokum en	12 Dokumen	66.709.80 0	12 Dokumen	135.279.8 00	12 Dokumen	203.849. 800	12 Dokumen	244.619.76 0	12 Dokumen	293.543.71 2		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan	%	12 Dokumen	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokum en	12 Dokumen	1.000.000	12 Dokumen	107.867.0 00	12 Dokumen	169.580. 000	12 Dokumen	203.496.00 0	12 Dokumen	244.195.20 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan yang diselesaikan	%	100%	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Lapora n	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	107.867.0 00	1 Laporan	169.580. 000	1 Laporan	203.496.00 0	1 Laporan	244.195.20 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokum en	-	-	1 Dokumen	101.010.0 00	1 Dokumen	169.580. 000	1 Dokumen	203.496.00 0	1 Dokumen	244.195.20 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan yang diselesaikan	%	100%	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	Lapora n	18 Laporan	1.000.000	18 Laporan	101.010.0 00	18 Laporan	180.000. 000	18 Laporan	216.000.00 0	18 Laporan	259.200.00 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokum en	-	-	1 Dokumen	500.000	12 Dokumen	18.000.0 00	12 Dokumen	21.600.000	12 Dokumen	25.920.000		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan

	4.02.01.1 .03	Admnistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah														Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokum en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamana n Barang Milik Daerah SKPD	Dokum en	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Lapora n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan , dan Pengendalia n Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapora n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapora n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan

	4.02.01.1 .03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapora n	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaata n Barang Milik Daerah SKPD	Dokum en	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah														Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan

	4.02.01.1 .05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	-	1 Unit	76.499.00 0	1 Unit	178.955. 000	1 Unit	214.746.00 0	1 Unit	257.695.20 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persen	100%	173.687.0 00	100%	35.687.94 8.000	100%	43.976.7 17.000	100%	52.722.060. 400	100%	63.216.472 .480		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen		1	-	1	-	-	-	-	-	1	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Laporan		1	-	1	-	-	-	-	-	1	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Dokumen		1	-	1	-	-	-	-	-	1	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



	4.02.01.1 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	5 Paket	500.000	5 Paket	250.000. 000	5 Paket	250.000.00 0	5 Paket	250.000.00 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia	Dokum en	-	-	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	50.000.0 00	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	72.000.000		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaa n Sistem Informasi Kepegawaia n	Dokum en	-	-	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	100.000. 000	12 Dokumen	120.000.00	12 Dokumen	144.000.00		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokum en	-	-	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	50.000.0 00	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	72.000.000		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanak an Tugas	Lapora n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan

	4.02.01.1 .05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtug askan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	55 Orang	173.687.0 00	-									Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30 Orang	173.687.0 00	25 Orang	601.664.0 00	25 Orang	739.608. 000	25 Orang	887.529.60 0	25 Orang	1.065.035. 520		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	-	-	99.000 Orang	35.007.28 5.000	99.000 Orang	42.598.1 54.000	99.000 Orang	51.117.784. 800	99.000 Orang	61.341.341 .760		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang- Undangan	Orang	-	-	3 Orang	500.000	3 Orang	10.000.0	3 Orang	12.000.000	3 Orang	14.400.000		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	2.863.562 .900	100%	5.130.405 .350	100%	9.559.24 8.648	100%	11.096.017. 663	100%	12.921.054 .809		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasarana	Dokum en	7 Dokumen	149.174.7 00	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	149.174.7 00	12 Paket	151.206.5 00	12 Paket	166.327. 150	12 Paket	182.959.86 5	12 Paket	201.255.85		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran	Paket	15 Paket	338.899.3 00	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	338.899.3 00	12 Paket	564.910.7 00	12 Paket	677.892. 840	12 Paket	813.471.40 8	12 Paket	976.165.69 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	,	1 Paket	315.000.0 00	1 Paket	378.000. 000	1 Paket	453.600.00 0	1 Paket	544.320.00 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasarana	Dokum en	7 Dokumen	922.500.7 00	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12 Bulan	922.500.7 00	12 Paket	2.212.368 .250	12 Paket	2.322.98 6.663	12 Paket	2.439.135.9 96	12 Paket	2.561.092. 795		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



	4.02.01.1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran	Dokum en	15 Dokumen	155.363.2 00	,	,	,	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan	Paket	12 Bulan	155.363.2 00	12 Paket	522.601.9 00	12 Paket	548.731. 995	12 Paket	658.478.39 4	12 Paket	790.174.07 3		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen yang Terkait Sarana dan Prasarana	Dokum en	7 Bulan	297.300.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokum en	12 Bulan	297.300.0 00	12 Dokumen	362.125.0 00	12 Dokumen	366.750. 000	12 Dokumen	440.100.00	12 Dokumen	528.120.00 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Paket	-					-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapora n	-	-	1 Laporan	500.000	12 Laporan	50.000.0 00	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Layanan Keprotokola n	Kali	360 Kali	1.000.325 .000	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	12 Laporan	1.000.325	12 Laporan	1.001.693 .000	12 Laporan	5.048.56 0.000	12 Laporan	6.058.272.0 00	12 Laporan	7.269.926. 400		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an arsip dinamis pada SKPD	Dokum en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pad SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintaha n berbasis elektronik pada SKPD	Dokum en	•		-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	1.900.034 .500	100%	4.199.063 .000	100%	5.270.66 7.035	100%	5.552.442.5 01	100%	5.883.092. 633		
	4.02.01.1 .07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	5 Unit	1.027.480 .000	5 Unit	1.027.48 0.000	5 Unit	1.027.480.0	5 Unit	1.027.480. 000		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	5 Unit	1.186.267 .000	5 Unit	1.186.26 7.000	5 Unit	1.186.267.0 00	5 Unit	1.186.267. 000		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



	4.02.01.1 .07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	Unit	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	-	12 Paket	68.145.70 0	12 Paket	500.000. 000	12 Paket	500.000.00 0	12 Paket	500.000.00		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Aset Yang Tercatat Tertib	Aset	3000 Aset	1.620.804 .500	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	200 Unit	1.620.804 .500	24 Unit	949.895.5 00	24 Unit	997.390. 275	24 Unit	1.047.259.7 89	24 Unit	1.099.622. 778		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .07.08	Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah Unit Aset tak berwujud yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



	4.02.01.1 .07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	0 Unit	500.000	2 Unit	200.000. 000	2 Unit	200.000.00	2 Unit	200.000.00		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	0 unit	500.000	2 unit	200.000.	2 unit	200.000.00	2 unit	200.000.00		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Aset yang Tercatat Tertib	Aset	150 unit	279.230.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	150 unit	279.230.0 00	150 unit	966.274.8 00	150 unit	1.159.52 9.760	150 unit	1.391.435.7 12	150 unit	1.669.722. 854		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persen	100%	9.202.419 .395	100%	12.244.14 4.660	100%	13.184.0 02.976	100%	13.871.363. 936	100%	14.600.909 .025		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran	%	100%	612.480.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapora n	12 Laporan	612.480.0 00	12 Laporan	707.504.0 00	12 Laporan	800.000. 000	12 Laporan	800.000.00	12 Laporan	800.000.00		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasarana	Dokum en	7 Dokumen	1.277.119 .395	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapora n	12 Laporan	1.277.119 .395	12 Laporan	1.421.105 .660	12 Laporan	1.563.21 6.226	12 Laporan	1.719.537.8 49	12 Laporan	1.891.491. 633		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	Lapora n	,	-	1 Laporan	500.000	12 Laporan	200.000. 000	12 Laporan	200.000.00	12 Laporan	200.000.00		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaia n Dilayani Secara Tertib	%	100%	7.312.820 .000	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	12 Laporan	7.312.820 .000	12 Laporan	10.115.03 5.000	12 Laporan	10.620.7 86.750	12 Laporan	11.151.826. 088	12 Laporan	11.709.417 .392		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan

	4.02.01.1 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persen	100%	3.473.968 .800	100%	5.287.628 .800	100%	5.948.91 1.680	100%	6.540.769.6 03	100%	7.216.832. 321		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasarana	Dokum en	7 Dokumen	765.048.0 00	,	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12 Unit	765.048.0 00	12 Unit	2.238.178 .000	12 Unit	2.350.08 6.900	12 Unit	2.467.591.2 45	12 Unit	2.590.970. 807		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					-	-		-				Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan

	4.02.01.1 .09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



	4.02.01.1	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasarana	Dokum en	7 Dokumen	2.095.961 .000	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.09.09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Unit	3 unit	2.095.961 .000	3 unit	1.544.711 .000	3 unit	1.544.71 1.000	3 unit	1.853.653.2 00	3 unit	2.224.383. 840		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasarana	Dokum en	7 Dokumen	612.959.8 00	-	-	•	-	-	•	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .09.10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Unit	3 unit	612.959.8 00	3 unit	1.503.739 .800	3 unit	1.654.11 3.780	3 unit	1.819.525.1 58	3 unit	2.001.477. 674		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .09.11	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Unit	-	-	1 Unit	500.000	1 Unit	200.000.	1 Unit	200.000.00	1 Unit	200.000.00		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .09.12	Pemeliharaan/Reh abilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaa n/Rehabilita si	На	-	-	0 Ha	500.000	2 Ha	200.000. 000	2 Ha	200.000.00	2 Ha	200.000.00		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan

	4.02.01.1 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen												
	4.02.01.1 .10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediaka n Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		-	-	-		-	-	-	-			Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	-	-	-	-	·	-	-		-			
	4.02.01.1 .11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	-	-	-	-	-	-	-		-			Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan

			dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan												
	4.02.01.1	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan	Orang											Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.11.03	Makil Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah	Orang		-	-	-		-	,	,	,		
	4.02.01.1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala	Orang/		_		_	-	_		_			Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.11.04	Operasional Repaid Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	•		
	4.02.01.1	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtang gaan Sekretariat Daerah	Persen		-	-	-		-					

	4.02.01.1 .12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	·	-	-	-	-	-	-	-			Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		kepala Daerali	Disediakan													
	4.02.01.1 .12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	,	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan													
	4.02.01.1 .13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persen	-		-	-	-	-	-	-	-			
	4.02.01.1 .13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokum en	-	,	-	-	-	-	-	-	-	,		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan

	4.02.01.1 .13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Lapora n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Lapora n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4.02.01.1 .14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Lapora n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan	Lapora n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
			Wakil Kepala Daerah													
	4.02.01.1 .14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Lapora n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan

	4.02.01.1 .15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahtera an DPRD	Persen	100%	53.764.49 6.620	100%	65.298.73 9.760	100%	68.617.3 21.898	100%	72.411.803. 693	100%	76.465.383 .823		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	402044	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Diselesaikan	%	100%	52.303.44 1.120	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ Bulan	12 Bulan	52.303.44 1.120	12 Bulan	62.615.90 2.760	12 Bulan	65.746.6 97.898	12 Bulan	69.034.032. 793	12 Bulan	72.485.734 .433		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan nya	Stel	175 Stel	1.135.655 .500	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	265 Paket	1.135.655 .500	4 Paket	2.073.947 .000	4 Paket	2.200.84 5.000	4 Paket	2.641.014.0 00	4 Paket	3.169.216. 800		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Pelayanan Kesehatan	%	100%	325.400.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



		Persentase Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	55 Orang	325.400.0 00	55 Orang	608.890.0	55 Orang	669.779. 000	55 Orang	736.756.90 0	55 Orang	810.432.59 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Persen	100%	1.050.179 .700	100%	6.977.498 .000	100%	9.371.74 4.000	100%	11.194.092. 800	100%	13.380.911 .360		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Administrasi Keanggotaa n DPRD	Dokum en	ı	ı	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	10.000.0	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1 .16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Lapora n	1	ı	1 Laporan	500.000	12 Laporan	200.000. 000	12 Laporan	200.000.00	12 Laporan	200.000.00		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.01.1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat dan Sidang yang Sesuai Jadwal	Kali	611 Kali	1.050.179 .700	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Lapora n	36 Laporan	1.050.179 .700	12 Laporan	6.975.998 .000	12 Laporan	9.111.74 4.000	12 Laporan	10.934.092. 800	12 Laporan	13.120.911 .360		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



	4.02.01.1 .16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	-	-	1 Paket	500.000	2 Paket	50.000.0	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	IKM DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pelayanan Set. DPRD		82,5	113.039.3 26.300	84,15	106.959.7 95.200	85,833	145.132. 592.700	87,54966	174.149.11 1.240	89,300653	208.968.93 3.488		
	4.02.02.1 .01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentuka n Perda dan Peraturan DPRD	Persen	100%	52.946.79 9.000	100%	43.521.44 7.000	100%	52.904.7 56.000	100%	63.475.707. 200	100%	76.160.848 .640		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentuka n Peraturan Daerah	Dokum en	20 Dokumen	53.000.00 0.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.00	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.440.000		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Bahan Kajian Hukum Terhadap Raperda	Bahan	20 Bahan	52.946.79 9.000	-	-	,	-	-	-	1	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokum en	20 Dokumen	52.946.79 9.000	22 Dokumen	43.024.44 7.000	22 Dokumen	52.358.7 56.000	22 Dokumen	62.830.507. 200	22 Dokumen	75.396.608 .640		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



	4.02.02.1 .01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	Dokum en	20 Dokumen	2.000.000	22 Dokumen	1.000.000	22 Dokumen	50.000.0 00	22 Dokumen	50.000.000	22 Dokumen	50.000.000		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokum en	10 Dokumen	450.000.0 00	12 Dokumen	450.000.0 00	12 Dokumen	450.000. 000	12 Dokumen	540.000.00	12 Dokumen	648.000.00		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokum en	1 Dokumen	1.500.000 .000	1 Dokumen	45.000.00 0	1 Dokumen	45.000.0 00	1 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	64.800.000		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasa n Kebijakan Anggaran	Persen	100%	30.000.00	100%	1.104.840 .000	100%	1.299.27 0.000	100%	1.559.124.0 00	100%	1.870.948. 800		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokum en	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	184.140.0 00	1 Dokumen	216.545. 000	1 Dokumen	259.854.00 0	1 Dokumen	311.824.80 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



	4.02.02.1 .02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokum en	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	184.140.0 00	1 Dokumen	216.545. 000	1 Dokumen	259.854.00 0	1 Dokumen	311.824.80 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokum en	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	184.140.0 00	1 Dokumen	216.545. 000	1 Dokumen	259.854.00 0	1 Dokumen	311.824.80 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokum en	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	184.140.0 00	1 Dokumen	216.545. 000	1 Dokumen	259.854.00 0	1 Dokumen	311.824.80 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokum en	1 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	184.140.0 00	2 Dokumen	216.545. 000	2 Dokumen	259.854.00 0	2 Dokumen	311.824.80 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .02.06	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Dokum en	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	184.140.0 00	1 Dokumen	216.545. 000	1 Dokumen	259.854.00 0	1 Dokumen	311.824.80 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelengga raan Pemerintah an	Persen	100%	615.000.0 00	100%	8.000.000	100%	1.458.08 0.000	100%	1.749.696.0 00	100%	2.099.635. 200		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



	4.02.02.1 .03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintaha n Bidang Pemerintaha n dan Hukum	Lapora n	12 Laporan	120.000.0 00	1 Laporan	1.000.000	14 Laporan	182.260. 000	14 Laporan	218.712.00 0	14 Laporan	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintaha n Bidang Infrastruktur	Lapora n	12 Laporan	120.000.0 00	1 Laporan	1.000.000	14 Laporan	182.260. 000	14 Laporan	218.712.00 0	14 Laporan	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintaha n Bidang Kesejahtera an Rakyat	Lapora n	12 Laporan	120.000.0 00	1 Laporan	1.000.000	14 Laporan	182.260. 000	14 Laporan	218.712.00 0	14 Laporan	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintaha n Bidang Perekonomi an	Lapora n	12 Laporan	120.000.0 00	1 Laporan	1.000.000	14 Laporan	182.260. 000	14 Laporan	218.712.00 0	14 Laporan	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintaha n Bidang Sumber Daya Alam	Lapora n	12 Laporan	120.000.0 00	1 Laporan	1.000.000	14 Laporan	182.260. 000	14 Laporan	218.712.00	14 Laporan	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



	4.02.02.1 .03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokum en	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	182.260. 000	1 Dokumen	218.712.00	1 Dokumen	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokum en	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	182.260. 000	1 Dokumen	218.712.00 0	1 Dokumen	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	Jumlah Rekomendas i Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Dokum en	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	182.260. 000	1 Dokumen	218.712.00	1 Dokumen	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100%	11.101.83 4.900	100%	12.822.47 9.700	100%	18.380.7 02.700	100%	22.056.843. 240	100%	26.468.211 .888		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Orientasi DPRD	Dokum en	3 Dokumen	2.500.000	55 Dokumen	1.000.000	55 Dokumen	1.873.77 6.000	55 Dokumen	2.248.531.2 00	55 Dokumen	2.698.237. 440		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan

	4.02.02.1	Bimbingan Teknis DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Anggota DPRD	%	100%	3.453.791 .000	-									Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokum en	6 Dokumen	3.453.791 .000	165 Dokumen	3.829.513 .700	165 Dokumen	3.829.51 3.700	165 Dokumen	4.595.416.4 40	165 Dokumen	5.514.499. 728		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Kegiatan DPRD yang di Publikasikan	Kali	1800 Kali	4.332.801 .000	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarlua san Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentas i Dewan	Dokum en	2000 Tayangan	4.332.801 .000	13 Dokumen	6.211.618 .000	13 Dokumen	8.713.87 4.000	13 Dokumen	10.456.648. 800	13 Dokumen	12.547.978 .560		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan

	4.02.02.1 .04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	144 Orang	5.000.000	144 Orang	1.841.380 .000	144 Orang	1.931.38 0.000	144 Orang	2.317.656.0 00	144 Orang	2.781.187. 200		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Ketersedia an Tenaga Ahli Fraksi yang Bersetifikat dan aktif	Orang	620 Orang	3.315.242 .900	-		-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	144 Orang	3.315.242 .900	420 Orang	936.968.0 00	420 Orang	1.667.63 9.000	420 Orang	2.001.166.8	420 Orang	2.401.400. 160		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Hubungan Masyarakat	Dokum en	12 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	182.260. 000	1 Dokumen	218.712.00 0	1 Dokumen	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan

	4.02.02.1 .04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokum en	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	182.260. 000	1 Dokumen	218.712.00 0	1 Dokumen	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpun an Aspirasi Masyarakat	Persen	100%	19.292.44 0.000	100%	21.922.95 2.900	100%	33.738.3 19.000	100%	40.485.982. 800	100%	48.583.179 .360		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Lapora n	48 Laporan	20.000.00	1 Laporan	1.000.000	12 Laporan	182.260. 000	12 Laporan	218.712.00	12 Laporan	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	umlah aspirasi yang diterima dan didistribusik an tepat waktu	Kali	24 Kali	86.286.00 0	-	-		-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokum en	55 Dokumen	86.286.00 0	1 Dokumen	392.619.9 00	1 Dokumen	1.360.52 0.000	1 Dokumen	1.632.624.0 00	1 Dokumen	1.959.148. 800		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan

	4.02.02.1	Pelaksanaan Reses	Jumlah reses yang bisa diakomodir dan disalurkan kepada yang berwenang	Kali	330000 Kali	19.206.15 4.000	-	-		-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah fasilitasi kegiatan Reses	Dokum en	3 Dokumen	19.206.15 4.000	3 Dokumen	21.529.33 3.000	3 Dokumen	32.195.5 39.000	3 Dokumen	38.634.646. 800	3 Dokumen	46.361.576 .160		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persen	100%	2.500.000 .000	100%	46.000.00 0	100%	227.260. 000	100%	272.712.00 0	100%	327.254.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokum en	1 Dokumen	1.000.000 .000	1 Dokumen	45.000.00 0	1 Dokumen	45.000.0 00	1 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	64.800.000		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua



	4.02.02.1 .06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Lapora n	12 Laporan	1.500.000 .000	1 Laporan	1.000.000	14 Laporan	182.260. 000	14 Laporan	218.712.00 0	14 Laporan	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasa n Kerja Sama Daerah	Persen	100%	10.000.00	100%	2.000.000	100%	364.520. 000	100%	437.424.00 0	100%	524.908.80 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendas i Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokum en	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	182.260. 000	1 Dokumen	218.712.00 0	1 Dokumen	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokum en	1 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	1.000.000	12 Dokumen	182.260. 000	12 Dokumen	218.712.00 0	12 Dokumen	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	100%	29.698.25 2.400	100%	27.532.07 5.600	100%	36.759.6 85.000	100%	44.111.622. 000	100%	52.933.946 .400		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang Memiliki Sertifikasi	%	100%	29.698.25 2.400	-	-	-	-	-	-	-	-		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokum en	96 Dokumen	29.698.25 2.400	2530 Dokumen	27.528.07 5.600	2530 Dokumen	36.030.6 45.000	2530 Dokumen	43.236.774. 000	2530 Dokumen	51.884.128 .800		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Lapora n	12 Laporan	5.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	182.260. 000	1 Laporan	218.712.00 0	1 Laporan	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokum en	1 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	1.000.000	12 Dokumen	182.260. 000	12 Dokumen	218.712.00 0	12 Dokumen	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokum en	1 Dokumen	5.000.000	80 Dokumen	1.000.000	80 Dokumen	182.260. 000	80 Dokumen	218.712.00	80 Dokumen	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan
	4.02.02.1 .08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokum en	1 Dokumen	5.000.000	220 Dokumen	1.000.000	220 Dokumen	182.260. 000	220 Dokumen	218.712.00 0	220 Dokumen	262.454.40 0		Semua Kab/Kota,Se mua Kecamatan, Semua Kelurahan



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Adapun Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Reformasi Birokrasi melalui strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Integritas Aparatur, Serta akuntabilitas dalam melayani Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Indikator Kinerja Setiap Tahunnya dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

		Kondisi Kinerja	Т	arget Ca	paian Se	tiap Tahu	ın	Kondisi Kinerja pada
No	Indikator	pada awal Periode	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Akhir
		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	IKM DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	0	82,5	84,15	85,833	87,54	89,30	89,30



## BAB VIII PENUTUP

## 8.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penyempurnaan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dari Tujuan, Sasaran, Strategis dan arah kebijakan sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 Merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya.

## 8.2 KAIDAH PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 berasal dari Aggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan selama 5 tahun, pada prinsipnya untuk memperkuat Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

yang dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

 Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



2. Konsistensi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan guna mendukung suksesnya Program RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarmasin, April 2023 Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Muhammad Jaini, SE., M.AP NIP 19710130 199303 1 004